PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN

Skripsi oleh:

GUSTI PRATIWI

NIM: 01071003055

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

INDERALAYA

Tahun 2011

S
336.243 07
Gus
p
2011

PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

Skripsi oleh:

GUSTI PRATIWI
NIM: 01071003055

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA
Tahun 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A	: GUSTI PRATIWI
NIM	: 01071003055
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: **PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 21 April 2011	Ketua :	Hj. Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak NIP 196503111992032002
Tanggal 02 Mei 2011	Anggota :	Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak NIP 196209131994032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Pratiwi

NIM : 01071003055

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

"Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Selatan".

Pembimbing

Ketua : Hj. Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak

Anggota : Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak

Tanggal diuji : 12 April 2011

adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 03 Mei 2011

Yang memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL 6000 DJP

Gusti Pratiwi

NIM 01071003055

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

N A M A	: GUSTI PRATIWI
NIM	: 01071003055
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: **PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN**

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 12 April 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 03 Mei 2011

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Hj. Rina Tjandrakirana DP.SE,MM,Ak	Drs. Burhanuddin,M.Acc,Ak	Dr. Inten Meutia,M.Acc,Ak
NIP 196503111992032002	NIP 195808281988101001	NIP 196905261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 195808281988101001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jangan ragu tuk mencoba, jangan takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan adalah hal yang membuat mimpi tidak akan bisa terwujud.

Persembahan:

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tuaku Drs. Syaiful Doelhier, M.Si dan Dra. Sunniati D.U., M.Si**
- **Adik-adikku Candri M.P Ramadhani dan M. Faried Fachier**
- **Eko Saputra Hayani**
- **Sahabat-sahabatku Betharia Indah A.S, Ayu Eka Putri, Tammy Adistia, Aulia Sabrina, Nanda Rizky P.U, Aldi Prima, dan Zuardiansyah A.P**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **"Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Selatan"**, yang merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab V Analisis dan Pembahasan, dan Bab VI Kesimpulan dan Saran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2010 jumlah NPWP terdaftar berpengaruh terhadap jumlah SPT yang disampaikan, jumlah SPT yang disampaikan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan jumlah NPWP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja serta merasa dibebankan atau diberatkan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Disamping itu pula, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Penulis,

Gusti Pratiwi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Selatan"** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal, A.K, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Sulaiman S.M., SE, MBA, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Dosen Pembimbing Akademik.
6. Hj. Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
7. Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
8. Dr. Inten Meutia, M.Acc, Ak, Anggota Penguji Ujian Komprehensif.
9. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Semua staf dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

11. Kepala dan staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, khususnya Pak Suryawan yang telah banyak membantu.
12. Kedua orang tuaku (Drs. Syaiful Doelhier, M.Si dan Dra. Sunniati D.U., M.Si) dan adik-adikku (Candri M.P Ramadhani dan M. Faried Fachier) yang telah memberikan nasihat, dukungan, doa, bantuan serta perhatian yang sangat besar.
13. Semua keluarga besarku, khususnya tante Dini yang telah menemani ke Kanwil Pajak, Andung dan Nyai yang telah mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
14. Eko Saputra Hayani terima kasih untuk semua dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.
15. Semua sahabatku Ayu Eka Putri, Betharia Indah A.S, Tammy Adistia, Aulia Sabrina, Nanda Rizky P.U, Aldi Prima, Zuardiansyah A.P yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih juga untuk Kak Mael dan Diah yang telah membantu mengajari saya program SPSS.
17. Teman-teman angkatan 2007, kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
18. Teman-teman SMA Kusuma Bangsa: Meyta Indri Wahyuni, Fadhila Rachmawati, Cherrya Dhia Wenny, Doni Ciputra terimakasih atas dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin.

Penulis,

Gusti Pratiwi

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 110592
TANGGAL 25 MAY 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI / TIDAK PLAGIAT iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIAN UJIAN KOMPREHENSIF iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAKSI xiv
ABSTRACT xv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 9
1.5. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Dasar-dasar Perpajakan 11
2.1.1. Pengertian Pajak 11
2.1.2. Fungsi Pajak 12
2.1.3. Jenis Pajak 13
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 15
2.1.5. Cara Pemungutan Pajak 16
2.1.6. Asas Pemungutan Pajak 17
2.1.7. Perlawanan Terhadap Pajak 17
2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 18
2.2.1. Pengertian NPWP 18
2.2.2. Dasar Hukum NPWP 19
2.2.3. Fungsi NPWP 20
2.2.4. Manfaat NPWP 21
2.2.5. Tempat Pendaftaran NPWP 22
2.2.6. Tata Cara Pendaftaran NPWP 22
2.2.7. Tata Cara Pemindahan NPWP 25
2.2.8. Tata Cara Penghapusan NPWP 28
2.2.9. Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP 29
2.3. Surat Pemberitahuan (SPT) 30
2.3.1. Pengertian SPT 30
2.3.2. Fungsi SPT 31
2.3.3. Jenis SPT 32
2.3.4. Pengambilan SPT 33
2.3.5. Pengisian dan Penyampaian SPT 34
2.4. Pajak Penghasilan (PPh) 34
2.4.1. Pengertian PPh 34

2.4.2. Subjek Pajak PPh 35
2.4.3. Objek Pajak PPh 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 39
3.2. Rancangan Penelitian 40
3.3. Objek Penelitian 40
3.4. Populasi dan Sampel 40
3.5. Jenis dan Sumber Data 41
3.6. Metode Pengumpulan Data 41
3.7. Variabel Penelitian 42
3.7.1. Variabel Dependen (X) 42
3.7.2. Variabel Independen (Y) 42
3.8. Hipotesis 42
3.9. Metode Analisis Data 43
3.9.1. Uji Normalitas 43
3.9.2. Uji Heteroskedastisitas 45
3.9.3. Uji Autokorelasi 45
3.9.4. Uji Multikolinearitas 46
3.10. Tehnik Analisis Data 47
3.11. Pengujian Hipotesis 47
3.11.1. Uji Signifikan Parsial (uji-t) 48
3.11.2. Koefisien Determinasi (R^2) 48
3.12.Tinjauan Penelitian Sebelumnya 48

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
4.1. Sejarah Singkat 50
4.2. Visi dan Misi 51
4.3. Struktur Organisasi 52
4.4. Data Penelitian 59

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN
5.1. Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 64
5.1.1. Analisis Penelitian 65
5.1.1.1. Uji Normalitas 65
5.1.1.2. Uji Heteroskedastisitas 69
5.1.1.3. Uji Autokorelasi 69
5.1.1.4. Uji Multikolinearitas 70
5.1.2. Tehnik Analisis Data 71
5.1.3. Pengujian Hipotesis 72
5.1.3.1. Uji Signifikan Parsial (uji-t) 72
5.1.3.2. Koefisien Determinasi (R^2) 75
5.2. Pengaruh Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 76
5.2.1. Analisis Penelitian 76
5.2.1.1. Uji Normalitas 76
5.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas 79
5.2.1.3. Uji Autokorelasi 80
5.2.1.4. Uji Multikolinearitas 81
5.2.2. Tehnik Analisis Data 82
5.2.3. Pengujian Hipotesis 83

5.2.3.1. Uji Signifikan Parsial (uji-t) 83
5.2.3.2. Koefisien Determinasi (R^2) 84
5.3. Pembahasan 85

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan 88
6.2. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah NPWP Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 59
Tabel 4.2. Jumlah NPWP Badan terdaftar di KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 60
Tabel 4.3. Jumlah NPWP (OP dan Badan) terdaftar di KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 60
Tabel 4.4. Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan ke KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 61
Tabel 4.5. Jumlah SPT Tahunan Badan yang disampaikan ke KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 61
Tabel 4.6. Jumlah SPT Tahunan (OP dan Badan) yang disampaikan ke KPP Pratama se Sumatera Selatan tahun 2008-2010 62
Tabel 4.7. Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Sumatera Selatan tahun 2008 62
Tabel 4.8. Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Sumatera Selatan tahun 2009 63
Tabel 4.9. Jumlah Penerimaan PPh di KPP Pratama Sumatera Selatan tahun 2010 63
Tabel 5.1. Statistik Deskriptif Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 64
Tabel 5.2. Uji Normalitas Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 66
Tabel 5.3. Uji Normalitas Transformasi Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 68
Tabel 5.4. Uji Autokorelasi Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh.... 70
Tabel 5.5. Uji Multikolinearitas NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 70
Tabel 5.6. Koefisien Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 71
Tabel 5.7. Uji-t Untuk Jumlah NPWP Terhadap Penerimaan PPh 73
Tabel 5.8. Uji-t Untuk Jumlah SPT Terhadap Penerimaan PPh 74
Tabel 5.9. Model Summary Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh ... 75
Tabel 5.10. Statistik Deskriptif Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 76
Tabel 5.11. Uji Normalitas Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 77
Tabel 5.12. Uji Normalitas Transformasi Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 79
Tabel 5.13. Uji Autokeralasi Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 80
Tabel 5.14. Uji Multikolinearitas Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 81
Tabel 5.15. Koefisien Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 82
Tabel 5.16. Uji-t Untuk Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 83
Tabel 5.17. Model Summary Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak 56
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak..... 57
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama..... 58
Gambar 5.1. Grafik Normal Probability Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 65
Gambar 5.2. Grafik Normal Probability Transformasi Jumlah NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh..... 67
Gambar 5.3. Grafik Scatterplot NPWP dan SPT Terhadap Penerimaan PPh 69
Gambar 5.4. Grafik Normal Probability Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT..... 77
Gambar 5.5. Grafik Normal Probability Transformasi Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT..... 78
Gambar 5.6. Grafik Scatterplot Jumlah NPWP Terhadap Jumlah SPT 80

Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Selatan

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah NPWP dan SPT yang disampaikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Selatan. Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan jumlah sampel 27 dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, dengan uji t dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa jumlah NPWP memiliki nilai t_{hitung} 0,653 < t_{tabel} 2,064 artinya jumlah NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jumlah SPT yang disampaikan memiliki nilai t_{hitung} 1,312 < t_{tabel} 2,064 artinya jumlah SPT yang disampaikan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan jumlah NPWP berpengaruh terhadap jumlah SPT yang disampaikan dengan t_{hitung} 10,874 >t_{tabel} 2,060. Koefisien determinasi (R^2) 0.469 atau 46,9% artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 46,9% dan sisanya 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel yang mungkin berpengaruh untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, karena variabel yang diambil penulis hanya melihat dari pihak wajib pajak, jadi masih ada variabel lain yang dapat dilihat dari pihak pemerintah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Pajak Penghasilan

Influence of Total Taxpayer Identification Number and Tax Returns of Income Tax Receipts on The Tax Office Pratama South Sumatra

Abstract

This study aims to examine whether the amount of tax ID and tax returns submitted affect the income tax revenue in the Tax Office (KPP) Pratama in South Sumatra. The methodology of research in this script is to use causal research design, with a sample of 27 of the years 2008 to 2010. The type of data used is secondary data. Data obtained from the Regional Office of Directorate General of Taxation in South Sumatra and Kep. Bangka Belitung. Data collected were analyzed by the method of data analysis done first before testing the assumptions of classical hypothesis testing. Testing the hypothesis in this study using multiple regression, with t test and determination coefficient test.

The results showed that the number of tax ID has t_{count} 0.653 <2.064 t_{table} means the amount of tax ID no effect on the income tax revenue. The number of returns submitted have t_{count} 1.312 <2.064 t_{table} means the amount of tax returns submitted does not affect the income tax revenue. While the number of tax ID effect on the number of tax returns submitted with t_{count} 10.874> 2.060 t_{table}. The coefficient of determination (R^2) 0469 or 46.9%, meaning that the independent variables affect the dependent variable at 46.9% and the rest 53,1% influenced by other factors.

It is expected to further research to add variables that may influence to test taxpayer compliance rate, since the variables are taken from the author sees only a taxpayer, so there's still other variables which can be seen from a government that is not included in this study.

Keywords: Taxpayer Identification Number, Tax Return, Income Tax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI (BAB I)

N A M A	: GUSTI PRATIWI
NIM	: 01071003055
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: **PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 21 April 2011 Ketua : _____

Hj. Rina Tjandrakirana DP. SE, MM, Ak
NIP 196503111992032002

Tanggal 02 Mei 2011 Anggota : _____

Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak
NIP 196209131994032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengemban amanat konstitusi bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang bermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik dari segi materiil maupun spiritual. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan impian setiap warga negara Indonesia karena jika pembangunan nasional terpenuhi secara merata, setiap masyarakat dari berbagai lapisan sosial bisa meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dan terjamin. Pembangunan nasional yang berhasil biasanya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan kearah perbaikan di semua sektor kehidupan. Pembangunan dan perbaikan pada sarana dan prasarana masyarakat dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu bukti konkrit dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Namun, dalam peningkatan dan pembangunan nasioanal

dibutuhkan materi yang tidak sedikit sehingga dari wacana diatas muncul suatu permasalahan yaitu menyangkut pembiayaan pembangunan, (Hermanda, 2010).

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun nonmigas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan negara terus-menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor nonmigas. Salah satunya adalah melalui sektor pajak. Sektor pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan selain karena jumlahnya yang relatif stabil, juga mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sejak tahun 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dimulai dengan reformasi pajak (*tax reform*) terhadap Undang-Undang pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi pajak ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Perubahan yang mendasar atas Undang-Undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, yaitu dari sistem *Official Assessment System* yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang, menjadi sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang menuntut Wajib Pajak menjadi proaktif. *Self Assessment System* menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Pada sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini menuntut masyarakat untuk mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi agar *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Ciri yang dimiliki sistem ini adalah adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, lebih adil dan merata, perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Perubahan sistem ini dilakukan untuk mengurangi kolusi, (Octavia, 2010). Selain itu, pemerintah bermaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah reformasi pajak tahun 1983, diadakan lagi reformasi tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun 2000 dilakukan lagi reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Tanah atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan terjadinya krisis yang melanda Indonesia, maka pemerintah memerlukan dana untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis yang terjadi. Sumber dana pemerintah telah mulai bergeser dari yang semula bertumpu pada sektor migas menjadi sektor nonmigas, yakni pajak. Dengan adanya perubahan tersebut maka pemerintah mulai melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sektor pajak tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan negara.

Peranan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat di dalam APBN-APBN tahun sebelumnya. Menurut informasi yang tercantum dalam data pokok APBN 2007 dan APBN 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, tercatat dalam APBN 2006, penerimaan negara dari pajak berjumlah Rp 409.203 (dalam miliar) atau sebesar 64,3%, pada tahun 2007 sebesar Rp 492.010,9 (dalam miliar) atau sebesar 71,28% dan pada tahun 2008 sebesar Rp 591.978,4 (dalam miliar) atau sebesar 76,0%. Melihat besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaporan pajak oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan agar tidak terjadi penyelewengan pajak oleh masyarakat, (Octavia, 2010).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui modernisasi administrasi perpajakan secara menyeluruh meliputi subyek modernisasi. Upaya ini pada tahun 2006 diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada tahap awal dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Melihat kantor operasional (KPP dan Kanwil) yang modern telah memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka *good governance* dan pelayanan prima, maka

kantor pusat juga dimodernisasi. Paradigma organisasi seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi, yakni: pelayanan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi direktorat atau bidang atau seksi yang khusus menangani jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaannya yang dilaksanakan pada awal 2007 untuk mendayung dan menggerakkan biduk organisasi merupakan sumber kekuatan untuk mengawali berjalannya proses modernisasi secara menyeluruh.

Tinjauan kebijakan sekarang mengarah ke Wajib Pajak, apakah telah mematuhi kebijakan dan peraturan yang telah disediakan. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih dinilai kurang. Sistem *self assessment* dapat disalahgunakan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak (dirjen pajak) perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh dirjen pajak diantaranya adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak (Yadi, 2009).

Upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan meningkatkan jumlah subyek pajak melalui kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayan Pajak (KPP) dan tentunya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Disamping melalui KPP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (internet).

Walaupun pemerintah telah memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki NPWP, seperti pada tahun 2008 dirjen pajak mencanangkan program

sunset policy, yang salah satunya adalah memberikan fasilitas "pengampunan pajak terbatas" yang akan dinikmati oleh masyarakat yang secara sukarela telah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Namun hingga tahun 2010 dan program *sunset policy* tersebut telah berakhir masih sedikit Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Padahal dengan adanya NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga pembayaran pajak berlangsung dengan lancar dan tidak disalahgunakan.

Sedangkan kegiatan intensifikasi adalah sebagai kegiatan pengungkapan laporan Wajib Pajak yang tidak benar. Upaya lain yang dilakukan adalah *canvassing*, program *knowing your tax payer*, dan penegakan hukum. Upaya lanjutan adalah kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau sebagai sarana untuk Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut KUP. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, (Yadi, 2009).

SPT merupakan media komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus. Untuk kelancaran komunikasi tersebut maka pengisian SPT tersebut harus benar, lengkap dan jelas serta dalam penyampaiannya harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan bab 1 pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 tahun 2007.

Namun dalam kenyataanya masih banyak Wajib Pajak baik badan maupun perorangan yang tidak atau terlambat dalam mengisi dan menyampaikan SPT-nya atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, lengkap dan jelas serta tidak tepat waktu. Padahal, hal ini dapat menghambat kinerja aparat pajak yang berdampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh KPP. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama untuk kelangsungan hidup suatu negara. Sehingga peran aparat pajak sebagai pengawas sangat diperlukan agar penyampaian SPT di KPP dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif dimana jenis pajak ini bisa dikenakan apabila syarat objektif dan syarat subjektif terpenuhi bagi orang pribadi ataupun badan. Penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Hal ini dapat terlihat dalam data pokok APBN 2007 dan APBN 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, bahwa dari total penerimaan pajak tahun 2007, penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 251.748,3 (dalam miliar) dari penerimaan pajak Rp 492.010,9 (dalam miliar) atau sebesar 51,1% dan pada tahun 2008 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 305.961,4 (dalam miliar) dari keseluruhan penerimaan pajak sebesar Rp 591.978,4 (dalam miliar) atau sebesar 51,6%, (Octavia,2010).

Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari tahun ke tahunnya, memiliki andil dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta

berkembangnya perekonomian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**PENGARUH JUMLAH NPWP DAN SPT YANG DISAMPAIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI SUMATERA SELATAN**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. apakah jumlah NPWP terdaftar berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama se Sumatera Selatan?
2. apakah jumlah SPT yang disampaikan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama se Sumatera Selatan?
3. apakah jumlah NPWP terdaftar berpengaruh terhadap jumlah SPT yang disampaikan di KPP Pratama se Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui apakah jumlah NPWP terdaftar berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama se Sumatera Selatan.
2. untuk mengetahui apakah jumlah SPT yang disampaikan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama se Sumatera Selatan.

3. untuk mengetahui apakah jumlah NPWP yang terdaftar berpengaruh terhadap jumlah SPT yang disampaikan di KPP Pratama se Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:

1. Bagi Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pribadi mahasiswa dan juga bermanfaat sebagai kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi ke dalam praktek dunia kerja yang nyata.
2. Bagi Kantor Pajak: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kantor pajak mengenai pengaruh dari pertambahan jumlah NPWP dan jumlah SPT yang disampaikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan.
3. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang pertambahan jumlah NPWP dan SPT yang disampaikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dari skripsi ini yang dijadikan dasar bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan analisis masalah yang ada seperti pengertian dan klasifikasi pajak, uraian mengenai NPWP, SPT, dan pajak penghasilan, dan ketentuan perpajakan lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum KPP Pratama yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab serta visi dan misi dari KPP Pratama.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang data dan fakta yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang telah ada. Serta dicari alternatif pemecahan masalah yang mungkin diterapkan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian serta berisi saran berdasarkan pembahasan data dan informasi yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Elcom. 2009. *Seri Belajar Kilat SPSS 17*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Undip. Semarang.

Ginting, Rusnedi Septiyanta. 2010. *Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hermanda, Selvi. 2010. *Analisis Pengaruh Self Assessment System Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.* Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu.* Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Octavia, Vivi. 2010. *Analisa Pengaruh Pertambahan Jumlah NPWP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate.* Edisi Pertama. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta.

Sari, Lidya Purnama. 2009. *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Susetio, Panji. 2010. *Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai).* Universitas Sumatera Utara. Medan.

Syahrevi, Reza Adnan. 2009. *Peranan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi FE UNSRI. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsri.* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 16, Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Yadi, Asral. 2009. *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.